

RECOVERY OF HOUSEHOLD CONSUMPTION AS ACCELERATOR OF ECONOMIC RECOVERY IN EAST JAVA: EMPIRICAL STUDY AND MACRO POLICY STRATEGIES

Muhamad Fathul Muin*¹ 

¹ Badan Pusat Statistik, Indonesia

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has harmed the economy in East Java. Households with the largest share of RGDP also experienced sluggish demand, which impacted the economic decline in East Java of more than eight trillion rupiahs. Economic recovery efforts through household consumption recovery are one of the strategic options to accelerate general economic recovery. Therefore, this study was conducted on RGDP data for household expenditure groups in all districts/cities in East Java during the 2016-2020 period using a panel regression analysis approach. The variables used include household consumption GRDP growth, inflation, regional poverty profile, percentage of internet users for online shopping, and the realization of social spending per capita of the poor. The findings of this study indicate that household consumption in East Java is classified as inelastic to price changes. It is due to the dominance of food consumption and controlled inflation. Meanwhile, the regional poverty profile has a negative impact on the recovery of household consumption. It shows that districts/cities with a high percentage of poor people tend to be more difficult to recover. Furthermore, the digitalization of the economy through e-commerce has not yet had a significant effect on the recovery of household consumption. It is due to the low use of the internet for online shopping among the population. The realization of social assistance per capita has a positive effect in encouraging the recovery of household consumption, although the contribution given is relatively small. It is caused by the low social assistance received compared to the loss of income experienced by the community. As a follow-up, there are four policies that the government can take to encourage the recovery of household consumption, including the sustainability of food price stabilization policies, increased penetration and digital education for MSMEs and the public, a combination of massive and comprehensive poverty alleviation policies, and synchronization of fiscal policy between government level.

Keywords: Economic Recovery; Household Consumption; Macroeconomic Approach.

*Korespondensi:
Muhamad Fathul Muin

E-mail:
fathul.muin@bps.go.id

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah berdampak buruk bagi perekonomian di Jawa Timur. Rumah tangga sebagai kelompok dengan andil terbesar terhadap PDRB turut mengalami kelesuan permintaan yang berdampak terhadap penurunan ekonomi di Jawa Timur lebih dari delapan triliun rupiah. Upaya pemulihan ekonomi melalui household consumption recovery menjadi salah satu opsi strategis untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi secara umum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan kajian terhadap data PDRB kelompok pengeluaran rumah tangga seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 2016-2020 dengan pendekatan analisis regresi panel. Variabel yang digunakan meliputi pertumbuhan PDRB konsumsi rumah tangga, inflasi, profil kemiskinan wilayah, persentase pengguna internet untuk belanja online, serta realisasi belanja sosial (bansos) per kapita penduduk miskin. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga di Jawa Timur tergolong inelastis terhadap perubahan harga. Hal ini disebabkan

oleh dominasi konsumsi pangan serta capaian inflasi yang terkendali. Sementara itu, profil kemiskinan wilayah berdampak negatif bagi pemulihan konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin yang tinggi cenderung lebih sulit untuk pulih. Selanjutnya, digitalisasi ekonomi melalui keberadaan e-commerce belum sepenuhnya berpengaruh secara berarti bagi pemulihan konsumsi rumah tangga. Hal itu disebabkan oleh rendahnya penggunaan internet untuk belanja online di kalangan penduduk. Adapun realisasi bansos per kapita berpengaruh positif dalam mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga, meskipun andil yang diberikan relatif kecil. Hal itu diakibatkan oleh rendahnya bansos yang diterima dibandingkan dengan hilangnya pendapatan yang dialami masyarakat. Sebagai tindak lanjut, terdapat empat kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga, meliputi keberlanjutan kebijakan stabilisasi harga pangan, peningkatan penetrasi dan edukasi digital kepada UMKM dan masyarakat, kombinasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang masif dan komprehensif, serta sinkronisasi kebijakan fiskal antar level pemerintahan.

Kata Kunci: Pemulihan Ekonomi; Konsumsi Rumah Tangga; Pendekatan Makroekonomi

JEL: E01; E60; O11; R21

Pendahuluan

Ekonomi Jawa Timur merupakan ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Secara konsisten, dari tahun 2016–2020, perekonomian Jawa Timur mampu memberikan sumbangan terhadap perekonomian nasional hingga 14 persen setiap tahunnya (BPS, 2021a). Oleh karena itu, *shock* perekonomian yang terjadi di Jawa Timur dipastikan akan berimbas pada perekonomian nasional.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian di Jawa Timur. Jika sebelumnya pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh diatas 5 persen, pada tahun 2020 ekonomi Jawa Timur harus mengalami penurunan hingga 2,39 persen (BPS, 2021b). Dari sisi lapangan usaha, penurunan tersebut dialami oleh 10 dari 17 sektor yang ada. Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang mengalami kerugian terbesar, dimana sektor tersebut pada tahun 2020 mengalami performa negatif sebesar -2,06 persen atau sekitar 10 triliun rupiah. Penurunan ekonomi pada sektor tersebut sangat signifikan bagi Jawa Timur, terlebih hampir sepertiga Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Jawa Timur berasal dari sektor manufaktur.

Sementara itu, jika dilihat dari kelompok pengeluaran, konsumsi rumah tangga merupakan kelompok dengan andil terbesar bagi perekonomian Jawa Timur. Setiap tahunnya konsumsi rumah tangga memberikan andil sekitar 60 persen terhadap total PDRB (BPS Jawa Timur, 2021b). Hanya saja, pada tahun 2020 konsumsi rumah tangga mengalami penurunan hingga -0,83 persen atau sekitar delapan triliun rupiah. Angka tersebut menyumbang seperlima terhadap total penurunan PDRB di Jawa Timur.

Merespon hal tersebut, saat ini pemerintah sedang fokus pada pemulihan ekonomi melalui beberapa kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN (Kemenkeu, 2020). Wujud konkret dari kebijakan tersebut diantaranya dalam bentuk pemberian stimulus permodalan untuk dunia usaha hingga stimulus konsumsi bagi masyarakat. Dalam aspek stimulus konsumsi, wujud dari kebijakan tersebut diantaranya berupa bantuan tambahan sembako, tambahan kartu prakerja, pembebasan tarif listrik, dan beberapa jenis bansos lainnya (BKF, 2020). Meskipun stimulus telah diberikan, perekonomian belum sepenuhnya pulih. Hal ini terbukti dari capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2021 sebesar 0,44 persen (BPS Jawa Timur, 2021c).

Konsumsi masyarakat memiliki peran krusial sebagai pembentuk *demand* terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen (Balleer dkk., 2020; Sheth, 2020). Adam Smith menyatakan bahwa konsumsi merupakan tujuan akhir dari seluruh proses produksi (Fellner & Goehmann, 2020). *Demand* merupakan pondasi dan salah satu penentu bagi perusahaan untuk menentukan jumlah *output* yang harus diproduksi (Alvaro & Ivars, 2014; Ben Hmida dkk., 2014). Tanpa adanya *demand*, *output* yang diproduksi tidak akan terserap oleh pasar.

Pemberlakuan *lockdown* maupun pembatasan aktivitas selama penanggulangan Covid19 akan berdampak terhadap *market demand* saat ini (del Rio-Chanona dkk., 2020; Yu dkk., 2020). Dampak yang ditimbulkan dapat berbentuk perubahan perilaku konsumen (Mehta dkk., 2020; Sheth, 2020), perubahan struktur permintaan pasar (Abu-Bakar dkk., 2021), maupun pengurangan jumlah permintaan secara agregat (Martin dkk., 2020). Dampak tersebut, terutama jenis dampak yang ketiga, memiliki pengaruh negatif bagi sosial-ekonomi. Hal itu karena penurunan *aggregate demand* akan direspon oleh produsen dengan mengurangi jumlah *output* melalui pemangkasan penggunaan *capital* maupun tenaga kerja. Pada akhirnya pengangguran akan bertambah, sehingga jumlah kemiskinan akan meningkat dan aktivitas ekonomi mengalami penurunan.

Oleh karena itu, memberikan perhatian kepada masyarakat untuk memastikan keterjagaan daya beli menjadi krusial (Lim dkk., 2021). Konsumsi rumah tangga yang kini sedang mengalami kelesuan perlu diberikan *treatment* dengan berbagai kebijakan relevan agar kembali pulih. Mempertimbangkan besarnya dominasi konsumsi rumah tangga terhadap struktur PDRB di Jawa Timur, maka menjadi hal yang tepat untuk memberikan perhatian kepada pemulihan tingkat konsumsi rumah tangga. Pulihnya daya beli masyarakat akan menjadi salah satu *booster* percepatan pemulihan ekonomi di Jawa Timur secara umum.

Dalam tataran kajian akademik, sejauh ini penelitian lebih didominasi oleh analisa dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara umum. Beberapa penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Nicola dkk (2020), Hensvik dkk (2021). Adapun penelitian dengan studi kasus di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Pradesha dkk (2020), Rozaki (2020), Sparrow dkk (2020), dan Susilawati dkk (2020). Sementara itu, penelitian yang mengkaji *household consumption recovery* di Indonesia masih sebatas penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Rosidin dkk (2021). Sedangkan penelitian yang secara spesifik mengkaji *economic recovery* di Jawa Timur, sejauh pengetahuan peneliti belum ditemukan. Hal itu dapat dipahami akibat kesulitan data yang diperoleh oleh para peneliti lain.

Dengan demikian, keberadaan penelitian yang mengkaji *economic recovery* khususnya dari sudut pandang pengeluaran rumah tangga merupakan hal yang relatif baru, terlebih untuk *scope* Jawa Timur. Penelitian tentang *consumption recovery* juga sangat penting untuk memberikan perspektif kepada pemerintah dalam mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan strategis yang dapat diambil.

Telaah Literatur

Urgensi Konsumsi Rumah Tangga bagi Perekonomian

Konsumen, baik individu maupun rumah tangga, merupakan pihak yang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginannya serta dapat memutuskan untuk membeli dan mengkonsumsinya (Valaskova dkk., 2015). Akumulasi dari konsumsi individu maupun rumah tangga tersebut menjadi salah satu bagian dari terciptanya lingkaran perekonomian, dimana produsen akan memproduksi sejumlah barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh rumah tangga, sedangkan produsen akan menerima imbal jasa dari konsumen (Krugman & Wells, 2006). Siklus tersebutlah yang menciptakan aktivitas ekonomi tetap eksis. Dalam sistem ekonomi terbuka,

meningkatnya permintaan/*demand* oleh rumah tangga akan direspon melalui peningkatan produksi domestik oleh produsen atau impor barang dari negara lain. Sebaliknya, lesunya permintaan akan berpengaruh terhadap penurunan total *output* yang diproduksi, yang berakibat pada penurunan ekonomi secara agregat.

Bagi daerah dengan struktur ekonominya (menurut kelompok pengeluaran) didominasi oleh konsumsi rumah tangga, maka menjaga kemampuan daya beli masyarakat menjadi agenda yang krusial (Pistaferri, 2015). Lesunya daya beli rumah tangga tanpa diimbangi oleh kemampuan ekspor yang memadai, akan berdampak sistemik terhadap sosial-ekonomi, mulai dari tingkat pengangguran yang meningkat hingga jumlah kemiskinan yang terus bertambah (Irons, 2009).

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi, total pendapatan akan sama dengan akumulasi dari konsumsi dan tabungan. Mengasumsikan bahwa konsumsi belum mencapai titik jenuh, maka peningkatan pendapatan pada rumah tangga akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut (Jaramillo & Chailoux, 2015; Kubicova dkk., 2019). Peningkatan konsumsi dapat berbentuk penambahan kuantitas konsumsi pada jenis barang dan jasa yang sama ataupun penambahan variasi produk yang dikonsumsi (Devi & Purnomosidi, 2019; Mottaleb & Mishra, 2016).

Irving Fisher juga menjelaskan terkait *behaviour* konsumen dalam memutuskan pilihan-pilihan konsumsi. Dimana pada prinsipnya, keputusan konsumsi dihadapkan pada optimasi antara *budget constraint* dan *preference* (Mankiw, 2012). *Budget constraint* yang dihadapi sangat erat kaitannya dengan pendapatan yang dimiliki, baik pendapatan saat ini maupun ekspektasi pendapatan dimasa mendatang. Sementara itu, terkait *preference*, konsumen dihadapkan pada berbagai opsi keputusan kombinasi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya pada level kepuasan yang sama.

Selain aspek pendapatan dan *preference*, terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi daya beli seseorang maupun rumah tangga. Menurut Valaskova dkk. (2015) dan Khaniwale (2015), faktor yang dapat memengaruhi konsumsi tersebut diantaranya adalah faktor personal, yaitu faktor yang menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa dapat dipengaruhi oleh kondisi demografi perorangan, mulai dari umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, *personality*, dan gaya hidup. Selain itu, faktor psikologis juga turut berperan serta, dimana faktor tersebut menjelaskan bahwa psikis seseorang seperti persepsi, motivasi, pengalaman, dan kepercayaan akan mempengaruhi keputusan konsumsi seseorang. Faktor berikutnya yaitu faktor sosial, dimana faktor tersebut bisa terdiri atas preferensi kelompok dimana dia berada, kondisi lingkungan keluarga, serta status sosial yang dimiliki. Adapun faktor selanjutnya adalah faktor kultural, dimana konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh kondisi budaya seseorang. Terakhir yaitu faktor ekonomi yang menekankan bahwa pengetahuan konsumen terhadap kebutuhan menjadi penentu seorang konsumen untuk memutuskan komposisi konsumsi terhadap barang dan jasa tersebut.

Fluktuasi Harga, Pendapatan, dan Tingkat Konsumsi

Harga dapat menggambarkan kuantitas dan kualitas suatu barang dan jasa. Variasi harga antar komoditas dan antar waktu dapat berbeda-beda bergantung pada ketersediaan pasokan (*supply*) dan besarnya permintaan (*demand*). Dari perspektif rumah tangga, harga memiliki pengaruh yang cukup berarti bagi mereka sebelum akhirnya memutuskan untuk membelinya (Albari & Safitri, 2018; Cham dkk., 2018). Harga sangat berpengaruh, terlebih untuk barang dan jasa yang sering dikonsumsi. Harga juga memengaruhi keputusan seseorang maupun rumah tangga untuk menentukan lokasi pembelian hingga substitusi barang alternatif lainnya (Faith & Agwu, 2014).

Kenaikan harga yang terjadi akan menyebabkan rumah tangga melakukan *adjustment* terhadap pengeluaran mereka. Sebagian akan mengalihkan pengeluarannya kepada hal-hal yang lebih *urgent* dan sebagian lagi akan berperilaku hidup sederhana (Poser & Shipchandler, 1979). Mello Jr. & Carneiro (2000) juga mengungkapkan bahwa fluktuasi pada harga turut memengaruhi fluktuasi *disposable income* yang diperoleh, yang pada akhirnya juga akan memengaruhi tingkat konsumsi/daya beli rumah tangga secara umum.

Terkait fluktuasi harga, data tersebut dapat diketahui melalui indikator indeks harga konsumen (IHK) dan inflasi yang di dirilis oleh Badan Pusat Statistik setiap bulannya. Secara konseptual, inflasi dapat diartikan sebagai tingkat kenaikan harga selama periode waktu tertentu (Oner, 2020). Indikator inflasi tersedia mulai dari level nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota tertentu, baik dalam rentang waktu bulanan maupun tahunan.

Kaitannya terhadap pendapatan seseorang, dengan mengasumsikan bahwa pendapatan tetap, inflasi menyebabkan pendapatn riil seseorang berkurang (Bozkurt, 2014; Braumann, 2004). Oleh karena itu, meskipun nominal dari pendapatan tersebut tetap, nilai tukar riil terhadap barang dan jasa justru melemah. Akibatnya, volume pembelanjaan terhadap barang dan jasa oleh rumah tangga akan lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, jika mengasumsikan bahwa pendapatan rumah tangga bersifat dinamis, terjadinya kenaikan harga/inflasi yang lebih cepat dibandingkan kenaikan pendapatan juga akan mengoreksi jumlah konsumsi rumah tangga (Susanto, 2014).

Demografi, Kemiskinan, dan Kemampuan Daya Beli

Menurut Headey & Hodge (2009), dengan jaminan ketersediaan akses pendidikan yang memadai, peningkatan jumlah penduduk memiliki andil positif dalam menggerakkan perekonomian. Ketika jumlah penduduk bertambah, maka *demand* terhadap barang dan jasa secara agregat juga meningkat (Yoon dkk., 2018). Salah satu respon dari pasar yaitu dengan meningkatkan *supply* barang dan jasa dengan cara meningkatkan kapasitas produksi (Crespi & Pianta, 2008). Respon dan siklus tersebut pada akhirnya akan mendorong aktivitas ekonomi untuk tetap tumbuh.

Meskipun demikian, dampak dari jumlah penduduk bagi perekonomian bisa bervariasi bergantung pada profil demografi suatu wilayah. Penambahan jumlah penduduk yang berujung pada penurunan produktivitas justru kontradiktif bagi pertumbuhan ekonomi (Maestas dkk., 2016). Selain itu, penambahan jumlah penduduk khususnya di negara-negara *low-income* justru memiliki dampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan rata-rata yang selanjutnya akan berpengaruh negatif bagi pertumbuhan ekonomi (Peterson, 2017).

Hal yang tidak kalah penting adalah profil kemiskinan penduduk suatu wilayah. Keberadaan penduduk miskin menjadi penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi (Breunig & Majeed, 2020). Ketika jumlah penduduk miskin di suatu wilayah meningkat, maka jumlah nilai pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi juga semakin besar. Hal ini dapat dipahami karena kemiskinan menggambarkan lemahnya daya beli seseorang akibat dari ketidakmampuannya untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa melalui pembelian (de Bruijn & Antonides, 2021; Jensen, 2009; Skeffington & Rea, 2017). Oleh karena itu, dalam taraf agregat hingga level wilayah, semakin banyak jumlah penduduk miskin, maka semakin besar pula penduduk yang tidak memiliki kemampuan daya beli. Akibatnya, daya beli domestik di wilayah tersebut rendah dan ekonomi sulit berkembang.

Indikator kemiskinan yang menggambarkan lemahnya daya beli masyarakat dapat diketahui melalui indikator kemiskinan moneter. Indikator tersebut merujuk kepada ketidakmampuan seseorang untuk mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa akibat pendapatan

dari individu tersebut yang rendah dan dibawah garis kemiskinan (Bader dkk., 2016; Roelen, 2017). Ketersediaan data indikator kemiskinan moneter dapat diakses melalui Badan Pusat Statistik dengan level estimasi angka nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota dengan satuan persentase maupun jumlah absolut.

Digitalisasi dan Akselerasi Konsumsi

Digitalisasi merupakan proses penggunaan piranti teknologi digital untuk berbagai keperluan. Saat ini, digitalisasi telah mempercepat perubahan dalam berbagai aspek ekonomi (Afonasova dkk., 2019), baik dari proses produksi, logistik dan distribusi, maupun konsumsi. Dari aspek produksi, digitalisasi mampu memberikan alternatif kepada perusahaan terkait efisiensi produksi dan penciptaan peluang nilai tambah baru terhadap *output* yang dihasilkan (Bjorkdahl, 2020). Adapun dari sisi logistik dan distribusi, digitalisasi mampu memberikan efisiensi dalam rantai pasok (Arenkov dkk., 2019). Sedangkan dari aspek konsumsi, digitalisasi mampu memberikan komparasi produk sesuai dengan keinginan rumah tangga selaku konsumen akhir, baik dari aspek harga maupun spesifikasi barang (Cochoy dkk., 2020). Selain itu, digitalisasi juga dapat meningkatkan peluang konsumen untuk memperoleh produk impor dari negara lain (Shyla, 2020).

Adanya pandemi Covid-19 telah mempercepat proses digitalisasi ekonomi. Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah mendorong para pelaku usaha untuk memasuki *digital market place*, seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya (UNDP & LPEM FEB UI, 2020). Laporan Asosiasi Pemasaran Seluler juga menunjukkan bahwa 70 persen konsumen telah mencoba setidaknya satu layanan digital baru selama pandemi (Chan dkk., 2020).

Digitalisasi melalui penerapannya dalam bentuk *e-commerce* mampu menggantikan eksistensi pertokoan konvensional (IMF, 2018), walaupun belum seluruhnya. Efek dari digitalisasi *marketplace* tersebut mempermudah rumah tangga untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Selain itu, keberadaannya juga dapat memberikan keleluasaan akses pasar serta harga yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan pertokoan konvensional. Pada akhirnya, digitalisasi tersebut akan mendorong konsumsi rumah tangga untuk meningkat (Sedik dkk., 2019).

Kebijakan Fiskal, Bantuan Sosial dan Pemulihan Ekonomi

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyesuaian pendapatan dan pengeluaran dalam APBD untuk mencapai stabilitas ekonomi dan laju pembangunan yang lebih baik (Yunanto & Medyawati, 2015). Kebijakan fiskal tersebut terdiri atas empat unsur, yaitu kebijakan pajak, keuntungan BUMD, pendapatan lainnya, serta kebijakan alokasi realisasi APBD (Wu, 2011).

Kebijakan fiskal memiliki andil yang cukup penting bagi perekonomian suatu wilayah, khususnya dalam mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Mengasumsikan kondisi *sticky price* dalam jangka pendek, transmisi kebijakan fiskal dapat ditempuh melalui penambahan realisasi APBD. Dampaknya bagi perekonomian secara makro yaitu dapat meningkatkan agregat *demand*, mendorong peningkatan pendapatan, dan meningkatkan partisipasi kerja. Pada akhirnya, efek tersebut akan berakhir pada terciptanya efek *multiplier* dalam meningkatkan konsumsi secara umum (Shaheen, 2019; Werning, 2012).

Salah satu komponen pembelanjaan dalam realisasi APBD yaitu belanja untuk bantuan sosial (bansos). Bansos tersebut dapat berbentuk pemberian sembako, listrik gratis, subsidi gaji, dan hal lain yang bersifat pemberian dari pemerintah untuk masyarakat yang memerlukan (Retnaningsih, 2020). Keberadaan bansos sangat penting utamanya bagi suatu wilayah dengan profil pendapatan masyarakat menengah kebawah.

Dalam setiap krisis, termasuk krisis akibat pandemi Covid-19, dampak ekonomi paling nyata yaitu meningkatnya pengangguran dan kemiskinan (Suryahadi dkk., 2020; Susilawati dkk., 2020). Konsekuensinya, konsumsi agregat juga akan menurun (Astuti & Mahardhika, 2020). Oleh karena itu, keberadaan bansos dapat menopang sejumlah pendapatan yang hilang (Gerard dkk., 2020), sehingga *budgeting* untuk keperluan konsumsi bagi rumah tangga dapat terjaga (Haile & Nino-Zarazua, 2018). Secara agregat, efektivitas stimulus bansos tersebut sangat bergantung kepada ketepatan sasaran penerima serta besaran nilai yang diberikan (Gobel, 2015; Maun, 2020).

Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pemulihan konsumsi rumah tangga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Andreyeva, dkk. (2010) dengan mengkaji hubungan antara fluktuasi harga dan kemampuan daya beli masyarakat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi literatur terhadap 160 artikel relevan yang mengkaji tentang elastisitas harga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kenaikan harga komoditas, khususnya makanan dan minuman nonalkohol berdampak terhadap penurunan konsumsi kedua jenis komoditas tersebut. Bahkan, kenaikan harga juga turut menyebabkan geseran konsumsi/substitusi dari beberapa jenis makanan tertentu.

Sementara itu, penelitian terkait digitalisasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap konsumsi juga pernah dilakukan oleh Kim (2020). Fokus kajiannya yaitu digitalisasi perekonomian selama Covid-19 dan dampaknya terhadap konsumsi di Amerika Serikat. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sejak pandemi Covid-19, sebanyak 60 persen penduduk berencana untuk menurunkan pengeluarannya. Meskipun demikian, tingkat penggunaan/akses terhadap *e-commerce* justru meningkat sebesar 16 persen. Selain itu, layanan belanja dan jasa pengiriman/*delivery* bahan makanan *online* juga tumbuh pesat. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah menginduksi konsumen untuk bertransformasi secara digital. Belanja *online* telah memberikan pengalaman tersendiri bagi para konsumen, khususnya terkait efisiensi waktu dalam berbelanja.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Wertheim-Heck dkk (2019) dengan *scope* kajian berfokus pada pola belanja rumah tangga miskin terhadap kebutuhan makanan sehari-hari di *supermarket*. Studi tersebut dilakukan terhadap 400 rumah tangga di Kota Hanoi, Vietnam dengan kriteria pendapatan perkapita maksimal sebesar 5 USD/orang/hari. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rumah tangga *urban* berpenghasilan rendah cenderung jarang berbelanja di toko *retail* modern, meskipun jarak tempat tinggal mereka ke *supermarket* tersebut sangat dekat. Rumah tangga miskin tersebut cenderung berbelanja di pasar tradisional, pedagang kaki lima, serta toko/warung informal lainnya.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Martin dkk. (2020) yang menelaah hubungan antara kebijakan fiskal, khususnya keberadaan bantuan sosial dan pengaruhnya terhadap perekonomian rumah tangga. Studi tersebut dilakukan di enam wilayah *Bay Area* yang meliputi San Francisco, Santa Clara, San Mateo, Marin County, Alameda County, dan Contra Costa. Hasil studinya menunjukkan bahwa keberadaan bantuan sosial, termasuk didalamnya adalah *Social Protection*, *Unemployment Insurance* (UI), dan *Coronavirus Aid, Recovery and Economic Security* (CARES) sangat signifikan dalam menekan *shock* akibat krisis pandemi Covid-19. Melalui bantuan sosial tersebut, tingkat keparahan serta durasi krisis yang berdampak terhadap penurunan konsumsi dan tabungan masyarakat dapat ditekan/diperpendek.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumsi rumah tangga dapat dipengaruhi oleh empat hal, yaitu inflasi, digitalisasi ekonomi, profil ke-

miskinan wilayah, serta bantuan sosial. Meskipun demikian, kajian spesifik yang membahas mengenai *household consumption recovery* selama pandemi Covid-19 di Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan keempat variabel tersebut masih belum tersedia.

Hipotesis dan Kerangka Berpikir

Inflasi

Konsumsi rumah tangga sangat bergantung kepada *budget* dari masing-masing rumah tangga tersebut. Kenaikan harga yang terjadi pada komoditas kebutuhan rumah tangga akan berdampak terhadap pengurangan *budget* riil untuk keperluan konsumsi. Konsekuensinya, dengan mengasumsikan bahwa pendapatan tetap, maka kenaikan harga yang terjadi akan berpengaruh terhadap penurunan konsumsi rumah tangga (Dallongeville dkk., 2011). Kondisi ini akan diperparah ketika pendapatan penduduk juga berkurang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H_0 : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga.

Profil Kemiskinan Wilayah

Rumah tangga miskin merupakan golongan yang sangat rentan. Ketika mereka menghadapi berbagai krisis akibat bencana, pandemi Covid-19, maupun krisis lainnya, rumah tangga tersebut mengalami kerugian paling besar dibandingkan kelompok rumah tangga tidak miskin. Bahkan, rumah tangga tersebut tidak berdaya untuk *recovery* kedalam kondisi seperti semula (Hallegatte dkk., 2020). Ketidak berdayaan inilah yang menjadi penyebab kemampuan konsumsi rumah tangga miskin juga rendah. Dalam cakupan regional, jumlah penduduk miskin akan linear dengan agregat konsumsi rumah tangga. Semakin banyak jumlah penduduk miskin, maka jumlah konsumsi agregat akan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki jumlah penduduk miskin lebih sedikit. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap konsumsi rumah tangga agregat suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H_0 : Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga.

Digitalisasi Ekonomi

Digitalisasi telah mengubah paradigma sebelumnya yang berbasis konvensional. Selain itu, digitalisasi juga mengubah dari yang sebelumnya *limited access* karena jarak dan waktu menjadi *unlimited access* (Khan dkk., 2015). Berbagai aktivitas ekonomi seperti transaksi jual-beli barang dan jasa dapat diperoleh dengan mudah oleh para konsumen. Konsumen tidak lagi memerlukan kehadiran secara fisik dengan mendatangi langsung ke toko, melainkan tergantikan dengan penggunaan *gadget*. Berbagai kemudahan bisa diperoleh oleh konsumen, mulai dari pemilihan spesifikasi barang, komparasi harga, hingga metode pembayaran. Semuanya telah disediakan melalui *platform e-commerce*. Oleh karena itu, berbagai kemudahan tersebut akan berpengaruh positif dalam menstimulus konsumsi rumah tangga (Toni & Hyyrylainen, 2018). Sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

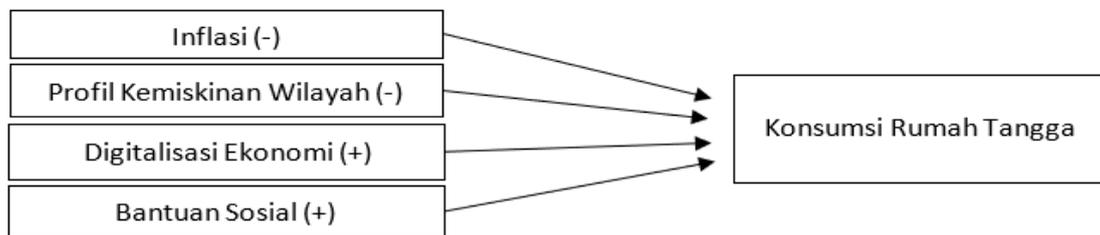
H_0 : Persentase penduduk yang menggunakan internet untuk belanja online berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga.

Bantuan Sosial

Bagi masyarakat di negara berpendapatan rendah dan menengah, pendapatan memiliki keterkaitan yang sangat erat terhadap besaran konsumsi (Diacon & Maha, 2015). Ketika pendapatan turun, maka tingkat konsumsi rumah tangga tersebut juga menurun. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki tabungan yang mencukupi, *re-budgeting* terhadap pos-pos pengeluaran menjadi keharusan. Oleh karena itu, keberadaan bantuan sosial dari pemerintah menjadi krusial. Bantuan sosial, dengan berbagai perwujudannya merupakan substitusi terhadap pendapatan yang hilang. Sehingga keberadaan bantuan sosial dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat (Sumarto dkk., 2004). Oleh karena itu, dalam penelitian ini hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₀ : Bansos berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga

Berdasarkan kajian teoritis, penelitian terkait, dan hipotesis yang disusun, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Berpikir

Metode Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatori. Data yang digunakan meliputi PDRB konsumsi rumah tangga, inflasi, jumlah penduduk miskin, jumlah pengguna internet untuk belanja *online*, dan realisasi APBD untuk belanja bantuan sosial. Dalam penelitian ini, cakupan unit observasi meliputi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dengan rentang data dari tahun 2016-2020. Seluruh data diperoleh melalui publikasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik baik oleh kantor pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Konsumsi Rumah Tangga

Indikator yang digunakan adalah persentase pertumbuhan PDRB menurut kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan/ADHK (2010=100). Indikator tersebut diperoleh dari 38 publikasi “Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran” untuk masing-masing kabupaten/kota dari tahun 2016-2020. Adapun formulasi penghitungan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Konsumsi Ruta}_{it} = \frac{\text{PDRB Konsumsi ADHK}_{it}}{\text{PDRB Konsumsi ADHK}_{i(t-1)}} \tag{1}$$

Keterangan:

- Pertumbuhan Konsumsi Ruta : pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran konsumsi rumah tangga
- PDRB Konsumsi ADHK : PDRB menurut pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan (2010=100)
- i : kabupaten/kota ke-i sebanyak 38 kabupaten/kota
- t : tahun 2016, ..., 2020

Inflasi

Indikator yang digunakan adalah persentase perubahan indeks harga konsumen rata-rata tahunan berjalan terhadap indeks harga konsumen rata-rata tahun sebelumnya. Indikator tersebut diperoleh dari publikasi “Indeks Harga Konsumen 82 Kota di Indonesia (2012=100)” tahun 2016-2019 dan publikasi “Indeks Harga Konsumen 90 Kota di Indonesia (2018=100)” tahun 2020. Penghitungan inflasi di Jawa Timur meliputi 8 wilayah, yaitu Jember, Banyuwangi, Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Sementara itu, 30 kabupaten/kota lainnya tidak memiliki ketersediaan data indeks harga konsumen dari BPS maupun harga pangan dari *website* PIHPS Bank Indonesia. Perlakuan terhadap 30 kabupaten/kota tersebut dengan menginputasi berdasarkan metode *sister city*, yaitu penggunaan referensi data inflasi dari kota terdekat. Secara rinci, sumber inputasi masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Daftar Kabupaten/Kota Proxy untuk Penghitungan Inflasi

No.	Kabupaten/Kota	Proxy Acuan	No.	Kabupaten/Kota	Proxy Acuan
1	Pacitan	Jember-Banyuwangi	16	Nganjuk	Kota Kediri
2	Ponorogo	Kota Madiun	17	Madiun	Kota Madiun
3	Trenggalek	Kota Kediri-Kota Madiun	18	Magetan	Kota Madiun
4	Tulungagung	Kota Kediri	19	Ngawi	Kota Madiun
5	Blitar	Kota Kediri-Kota Malang	20	Bojonegoro	Kota Kediri-Kota Madiun-Kota Surabaya
6	Kediri	Kota Kediri	21	Tuban	Kota Kediri-Kota Madiun-Kota Surabaya
7	Malang	Kota Malang	22	Lamongan	Kota Surabaya
8	Lumajang	Jember	23	Gresik	Kota Surabaya
9	Bondowoso	Jember-Banyuwangi	24	Bangkalan	Sumenep-Kota Surabaya
10	Situbondo	Jember-Banyuwangi	25	Sampang	Sumenep
11	Probolinggo	Jember	26	Pamekasan	Sumenep
12	Pasuruan	Kota Probolinggo-Kota Surabaya	27	Kota Blitar	Kota Kediri-Kota Malang
13	Sidoarjo	Kota Surabaya	28	Kota Pasuruan	Kota Probolinggo-Kota Surabaya
14	Mojokerto	Kota Surabaya	29	Kota Mojokerto	Kota Surabaya
15	Jombang	Kota Kediri-Kota Malang	30	Kota Batu	Kota Malang

Adapun formulasi penghitungan inflasi adalah sebagai berikut:

$$Inflasi_{it} = \frac{Rata - rata \text{ tahunan } IHK_{it}}{Rata - rata \text{ tahunan } IHK_{i(t-1)}} \quad (2)$$

Keterangan:

IHK : Indeks Harga Konsumen

i : kabupaten/kota ke-i sebanyak 8 kabupaten/kota (Jember, Banyuwangi, Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya)

t : tahun 2016, ..., 2020

Profil Kemiskinan Wilayah

Indikator yang digunakan adalah persentase jumlah penduduk miskin absolut terhadap jumlah penduduk di tiap-tiap kabupaten/kota setiap tahunnya. Data tersebut diperoleh melalui publikasi “Provinsi Jawa Timur Dalam Angka” yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Formulasi penghitungan variabel tersebut adalah yaitu sebagai berikut:

$$\text{Profil Kemiskinan Wilayah}_{it} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Absolut}_{it}}{\text{Jumlah Penduduk}_{it}} \quad (3)$$

Keterangan:

i : kabupaten/kota ke-i sebanyak 38 kabupaten/kota

t : tahun 2016, ..., 2020

Digitalisasi Ekonomi

Indikator yang digunakan adalah persentase penduduk di tiap-tiap kabupaten/kota yang menggunakan internet untuk belanja *online*. Data tersebut diperoleh melalui publikasi “Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur” dari tahun 2016-2020 yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Dari rentang data selama 5 tahun tersebut, terdapat perbedaan terkait ketersediaan data yang ada. Adapun permasalahan dan perlakuan terhadap permasalahan data tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Data yang tersedia pada tahun 2016 merupakan gabungan antara indikator penggunaan internet untuk belanja *online* dan penjualan *online*. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakanlah proporsi penggunaan internet hanya untuk belanja *online* dengan menggunakan rata-rata data tahun 2017 dan 2019.
- b) Data penggunaan internet untuk belanja *online* tidak tersedia pada tahun 2018, sehingga digunakanlah rata-rata dari 2 tahun yang berdekatan yaitu tahun 2017 dan 2019.

Adapun formulasi penghitungan variabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$PIBO_{it} = \frac{JPIO_{it}}{\text{Jumlah Penduduk}_{it}} \quad (4)$$

Keterangan:

PIBO : persentase penduduk 5 tahun ke atas yg mengakses internet untuk keperluan belanja online terhadap total penduduk

JPIO : jumlah penduduk 5 tahun ke atas yang menggunakan internet untuk belanja *online*

i : kabupaten/kota ke-i sebanyak 38 kabupaten/kota

t : tahun 2016, ..., 2020 (kecuali tahun 2018)

Bantuan Sosial

Indikator yang digunakan adalah realisasi APBD untuk belanja bantuan sosial per kapita menurut jumlah penduduk miskin di tiap-tiap kabupaten/kota. Kecuali data pada tahun 2020, data realisasi APBD belum tersedia. Sehingga data yang digunakan adalah APBD pada tahun tersebut. Seluruh data tersebut diperoleh dari publikasi “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Buku 1 (Sumatera, Jawa)” tahun 2016-2020. Adapun formulasi dari indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

$$\text{Bansos per Kapita}_{it} = \frac{\text{APBP untuk Bansos}_{it}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}_{it}} \quad (5)$$

Keterangan:

- Bansos per Kapita : realisasi belanja APBD untuk belanja sosial per kapita menurut jumlah penduduk miskin
 APBD Bansos : realisasi belanja APBD untuk bantuan sosial
 i : kabupaten/kota ke-i sebanyak 38 kabupaten/kota
 t : tahun 2016, ..., 2020

Tabel 2: Rangkuman Variabel dan Sumber yang Digunakan

No.	Variabel	Satuan	Sumber
1.	Konsumsi rumah tangga	Persen	38 Buku Publikasi Produk Domestik Regional Bruto masing-masing Kabupaten/Kota menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020
2.	Inflasi	Persen	4 Buku Publikasi Indeks Harga Konsumen 82 Kota di Indonesia (2012=100) Tahun 2016-2019 dan 1 Buku Publikasi Indeks Harga Konsumen 90 Kota di Indonesia (2018=100) Tahun 2020
3.	Profil kemiskinan wilayah	Persen	5 Buku Publikasi Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2016-2020
4.	Digitalisasi ekonomi	Persen	5 Buku Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020
5.	Bantuan sosial	Rupiah	4 Buku Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 Buku 1 (Sumatera, Jawa)

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel, yaitu analisis regresi yang mengkombinasikan data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* yang digunakan terdiri atas 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan data *time series* yang digunakan terdiri dari 5 periode, yaitu: 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. *Tool* statistik yang digunakan dalam pengolahan data tersebut adalah Eviews 9.0 dikombinasikan dengan STATA.

Secara umum, model regresi panel dituliskan sebagai berikut (Greene, 2012):

$$y_{it} = \alpha + x_{it}\beta + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

Keterangan:

- y_{it} : variabel terikat dari individu ke-i pada periode ke-t
 x_{it} : variabel bebas dari individu ke-i pada periode ke-t
 α : intersep
 β : parameter
 ε_{it} : *error term* dari individu ke-i pada periode ke-t
 i : kabupaten ke-1 hingga ke-38 (Pacitan, ..., Kota Batu)
 t : tahun ke-1 hingga ke-5 (2016, ..., 2020)

dimana *error term* (ε_{it}) dapat didekomposisi ke dalam bentuk:

$$\varepsilon_{it} = u_i + v_{it} \quad (7)$$

dengan u_i merupakan efek individu dan v_{it} merupakan efek sisanya.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan, menurut Hill dkk (2011) yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan estimasi model terbaik dengan menggunakan 3 jenis uji statistik. Secara umum, kemungkinan model yang dapat diperoleh terdiri atas 3 jenis, yaitu:
 - a. Model *common effect* (CEM), merupakan model yang mengasumsikan tidak adanya perbedaan antar individu maupun antar waktu atau dengan kata lain efek tersebut bersifat konstan. Keputusan untuk menentukan model ini didasari atas 2 jenis statistik uji, yaitu uji Chow dan uji LM. Ketika probabilitas model pada hasil kedua uji statistik tersebut tidak signifikan, maka CEM merupakan estimasi model terbaik.
 - b. Model *fixed effect* (FEM), merupakan model yang mengasumsikan adanya efek yang berbeda antar individu dan bersifat tetap. Perbedaan individu tersebut akan berdampak terhadap perbedaan nilai intersep untuk setiap pemodelan provinsi. Untuk mengambil keputusan bahwa FEM merupakan estimasi model terbaik, diperlukan 2 hasil statistik uji, yaitu uji Hausman dan uji Chow. Ketika probabilitas pada hasil uji statistik Hausman dan uji Chow signifikan, maka FEM merupakan estimasi model terbaik.
 - c. Model *random effect* (REM), merupakan model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep pada setiap individu, dimana intersep merupakan variabel random yang mengakomodir perbedaan karakteristik individu dan waktu. Pertimbangan untuk memutuskan REM sebagai model terbaik diperlukan 2 kesimpulan hasil uji statistik, yaitu uji Hausman dan uji LM. Ketika hasil uji Hausman menunjukkan tidak signifikan dan uji LM signifikan, maka REM merupakan estimasi model terbaik.
2. Pengujian asumsi klasik regresi panel yang terdiri atas pengujian asumsi normalitas, homoskedastisitas, dan non-multikolinearitas. Penggunaan uji asumsi tersebut dimaksudkan agar diperoleh nilai estimator yang *unbiased* dan konsisten. Ketika terdapat pelanggaran pada salah satu asumsi tersebut, maka diperlukan beberapa perlakuan sebagaimana pada tabel 3.

Tabel 3: Jenis Pelanggaran Asumsi dan Perlakuan

No.	Asumsi yang Dilanggar	Perlakuan
1.	Normalitas residual	Transformasi data (Chou dkk., 1998)
2.	Homoskedastisitas	Penggunaan <i>clustered standard errors</i> (Bai dkk., 2020), penghitungan tertimbang <i>white diagonal</i>
3.	Non-multikolinearitas	Meninjau kembali terhadap variabel bebas yang digunakan atau menggunakan regresi Ridge (Chen, 2012; Duzan & Shariff, 2016).

3. Pengujian kelayakan model regresi yang terdiri atas pengujian simultan (*F-test*), uji parsial (*t-test*), dan uji kesesuaian model. Ketiga uji tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh perubahan variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Model yang baik adalah model yang tidak memerlukan banyak variabel independen namun mampu menjelaskan fenomena perubahan pada variabel dependen dengan sangat akurat.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Model yang Sesuai

1. Uji Kesesuaian antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM)

Hasil pengujian kesesuaian model yang pertama dilakukan adalah berdasarkan uji Chow. Dari hasil uji sebagaimana pada tabel xx diperlihatkan bahwa probabilitas *cross-section F* adalah 19 persen, sementara pada hasil *cross-section Chi-square* sebesar 6 persen. Dari kedua hasil

tersebut ditetapkan bahwa nilai penentuan yang digunakan adalah hasil pada *cross-section Chi-square* dengan ambang batas signifikansi 10 persen. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan model CEM.

Tabel 4: Hasil Uji Statistik Chow

Tes Efek	Statistik	d.f.	Prob.
<i>Cross-section F</i>	1,2302	(37; 148)	0,1941
<i>Cross-section Chi-square</i>	50,9510	37	0,0631

2. Uji Kesesuaian antara *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM)

Selanjutnya perlu dilakukan pengujian kesesuaian model terakhir antara REM dan FEM dengan menggunakan uji Hausman. Berdasarkan Uji Statistik Hausman pada tabel xx terlihat probabilitas hasil uji sebesar nol persen dan jauh dibawah ambang batas yang ditetapkan sebesar 10 persen. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan model REM.

Tabel 5: Hasil Uji Statistik Hausman

Ringkasan Hasil Uji	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. d.f.	Prob.
<i>Cross-section random</i>	40,4689	4	0,0000

Dari hasil kedua uji tersebut menunjukkan bahwa pada model model FEM lebih baik digunakan dibandingkan model CEM maupun model REM. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian terhadap asumsi klasik regresi panel yang terdiri dari uji normalitas, uji non-multikolinearitas, dan uji homoskedastisitas.

Uji Asumsi

1. Normalitas

Tabel 6: Hasil Uji Jarque-Bera Test

Jenis Uji	Statistik	Prob.
Jarque-Bera test	0,7970	0,6713

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan indikator Jarque-Bera, diperoleh nilai probabilita hasil pengujian sebesar 67 persen dan jauh diatas ambang batas yang ditetapkan pada level 10 persen. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa distribusi residual dari model yang dibentuk berdistribusi normal.

2. Non Multikolinearitas

Tabel 7: Hasil Uji Keberadaan Multikolinearitas

Uji Efek	VIF	1/VIF
Inflasi	6,35	0,1576
Kemiskinan	5,23	0,1911
Digitalisasi	2,31	0,4337
Bansos	1,56	0,6422
Rata-rata	3,86	

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh skor VIF (*Variance Inflation Factor*) seluruh variabel dibawah *threshold* yang ditentukan sebesar 10. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan keempat variabel tersebut dalam pemodelan terbebas dari masalah multikolinearitas.

3. Homoskedastisitas

Tabel 8: Hasil Uji Wald Test

Jenis Uji	Statistik	Prob.
Wald test	174,32	0,0000

Berdasarkan hasil pengujian dengan *modified Wald test*, diperoleh nilai probabilita sebesar 0,00 dan dibawah ambang batas yang ditetapkan yaitu sebesar 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan set data tersebut mengalami heteroskedastisitas, sehingga diperlukan langkah lanjutan terhadap model yang terbentuk. Namun sebelumnya perlu dilakukan pengujian terkait keberadaan dependensi *residual cross-section* serta *cross-sectional correlation* varian-kovarian.

Tabel 9: Hasil Uji Homoskedastisitas antar Unit Cross-Section

Jenis Uji	Statistik	Prob.
Breusch-Pagan LM	1.326,594	0,0000
Pesaran scaled LM	15,617	0,0000
Bias-corrected scaled LM	10,867	0,0000
Pesaran CD	6,301	0,0000

Dari hasil pengujian terhadap dependensi *residual cross-section* diketahui bahwa antar unit *cross-section* memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas pada unit *cross-section*, sehingga diperlukan *treatment* lanjutan untuk mengakomodir pelanggaran asumsi tersebut.

Pemodelan Akhir

Pemodelan akhir yang digunakan yaitu *fixed effect model* (FEM) dengan pembobotan GLS menggunakan *cross-section weight*. Adapun pembobotan terhadap *coef variance method* yang digunakan adalah *white period*.

Tabel 10: Hasil Pemodelan Akhir

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	19,8038	2,3781	8,3275	0,0000
Inflasi	1,1231	0,2290	4,9038	0,0000
Kemiskinan	-1,4582	0,1910	-7,6363	0,0000
Digitalisasi	-0,7960	0,1080	-7,3688	0,0000
Bansos	0,0007	0,0004	1,6364	0,1039
<i>R-squared</i>	0,6437	<i>F-statistic</i>		6,5227
<i>Adjusted R-squared</i>	0,5450	Prob. (<i>F-statistic</i>)		0,0000

Model akhir yang diperoleh telah memenuhi asumsi normalitas, homoskedastisitas, dan nonmultikolinearitas yang digunakan dalam regresi data panel. Sehingga model tersebut sudah relevan untuk menjelaskan konsumsi rumah tangga di Jawa Timur. Model tersebut adalah sebagai berikut:

$$KRT = 19,8038 + 1,1231Inflasi - 1,4582Kemiskinan - 0,7960Digitalisasi + 0,0007Bansos \quad (8)$$

Keterangan:

KRT : Pertumbuhan PDRB konsumsi rumah tangga
Kemiskinan : Persentase jumlah penduduk miskin

- Digitalisasi : Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang menggunakan internet untuk belanja *online*
- Bansos : Realisasi APBD untuk belanja bantuan sosial perkapita terhadap jumlah penduduk miskin

Hasil pengujian *overall test* maupun uji parsial menunjukkan nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi sepuluh persen, seluruh variabel bebas yang digunakan dalam pemodelan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Hasil dari pemodelan tersebut juga memberikan nilai *adjusted R²* sebesar 0,5450 yang berarti bahwa 54,5 persen keragaman pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat dijelaskan oleh keragaman variabel bebas yang digunakan.

Analisis dan Pembahasan

Pengaruh Inflasi terhadap Konsumsi Rumah Tangga

Statistik pendapatan yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2019, tingkat pendapatan bersih pekerja sendiri maupun pekerja bebas memiliki tren yang positif. Meskipun demikian, pada tahun 2020 pendapatan tersebut justru mengalami penurunan hingga empat persen. Adanya penurunan pendapatan yang diiringi oleh inflasi tahunan 2020 sebesar 1,44 persen telah memberikan efek ganda terhadap penurunan pendapatan riil rumah tangga. Penurunan pendapatan riil bukan hanya dipengaruhi oleh penurunan pendapatan akibat pandemi saja, melainkan juga dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi.

Meskipun demikian, terdapat temuan yang menarik dari hasil pemodelan terhadap inflasi di Jawa Timur. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pengaruh inflasi justru bernilai positif terhadap tingkat konsumsi rumah tangga. Dari model tersebut diketahui bahwa kenaikan inflasi sebesar satu persen akan berpengaruh terhadap *recovery* konsumsi rumah tangga dalam bentuk peningkatan konsumsi sebesar 1,3 persen. Hal ini justru bertolak belakang dengan hipotesis dan kajian teoritis yang dibangun dalam penelitian ini.

Terkait hal tersebut, terdapat penjelasan dari aspek elastisitas konsumsi terhadap tingkat harga. Jika ditinjau berdasarkan komposisi konsumsi masyarakat, hasil Survei Biaya Hidup (SBH) maupun Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, pengeluaran makanan mendominasi struktur konsumsi masyarakat secara agregat. Hanya Kota Surabaya yang merupakan kota dengan proporsi konsumsi makanan tergolong rendah (BPS, 2020; BPS Jawa Timur, 2020b). Sementara itu, tinjauan terhadap capaian realisasi inflasi selama tahun 2016-2020 juga memperlihatkan bahwa inflasi pada bahan kelompok makanan memberikan andil terbesar terhadap total capaian inflasi tahunan (BPS Jawa Timur, 2017, 2018, 2019, 2020a, 2021a).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan positif antara inflasi dan konsumsi rumah tangga disebabkan oleh inelastisitas konsumsi (khususnya kelompok makanan), akibat ketergantungan dan kebutuhan yang cukup tinggi terhadap komoditas pangan. Oleh karena itu, meskipun komoditas pangan mengalami kenaikan, kecil kemungkinannya akan berdampak terhadap penurunan konsumsi pada komoditas tersebut. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Ni Mhurchu dkk (2013) dan Femenia (2019) dengan kasus studi di tempat lain. Keduanya berkesimpulan bahwa kenaikan harga pada komoditas tertentu (khususnya bahan makanan pokok) umumnya tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi harga. Oleh karena itu, kenaikan harga pada komoditas-komoditas tertentu (dalam hal ini adalah komoditas pangan di Jawa Timur) tidak akan berpengaruh secara berarti terhadap total konsumsi rumah tangga.

Selain dari perspektif inelastisitas harga, temuan ini juga memiliki keterkaitan terhadap fenomena *inflation threshold*, dimana inflasi memiliki *dual impact* pada perekonomian bergantung pada capaian inflasi tersebut. Ketika inflasi berada dibawah ambang batas, maka dampak terhadap ekonomi maupun *demand* adalah positif. Sementara itu, ketika nilai tersebut melebihi ambang batas yang ditentukan, inflasi justru akan berbalik arah dan memberikan dampak negatif bagi perekonomian. Dalam kasus di Indonesia, [Kusumatriksna dkk \(2019\)](#) menunjukkan bahwa *inflation threshold* tersebut bernilai 9,57 persen. Sedangkan [Vinayagathan \(2013\)](#) dan [Aydın dkk \(2016\)](#) berkesimpulan pada nilai 5,43 persen dan 7,97 persen. Meskipun terdapat perbedaan nilai *threshold*, namun secara spesifik untuk kasus di Jawa Timur belum ditemukan penelitian yang mengukur *threshold* inflasi di wilayah tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 tahun 2017 yang menetapkan target inflasi periode 2019-2021 dapat digunakan sebagai acuan. Kondisi tahun 2020, target inflasi yang ditetapkan sebesar 3 ± 1 persen. Sementara itu, capaian inflasi di kota-kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa seluruhnya berada dibawah target.

Meskipun pengaruh inflasi terhadap konsumsi rumah tangga positif, bukan berarti setiap kenaikan harga selalu berdampak positif. Kenaikan harga tidak akan menggerus *aggregate demand* secara signifikan selama capaian inflasi tersebut masih dapat ditoleransi oleh rumah tangga. Inflasi temporer yang diakibatkan oleh fenomena *panic buying* perlu menjadi perhatian pemerintah maupun Bank Indonesia. Hal itu karena fenomena *panic buying* akan menyebabkan terjadinya *hyperinflation* pada komoditas tersebut. Fenomena ini sangat berisiko ketika komoditas sasaran *panic buying* merambah hingga ke komoditas-komoditas strategis lainnya. Inflasi yang tinggi akibat melejitnya permintaan temporer yang tidak diimbangi oleh kecukupan *supply* akan menyebabkan daya beli masyarakat anjlok ([Braumann, 2004](#); [Coibion dkk., 2019](#); [Jaravel & O'Connell, 2020](#)).

Oleh karena itu, kebijakan moneter melalui pengendalian dan stabilisasi harga-harga masih menjadi salah satu langkah yang prudent untuk menjaga daya beli rumah tangga. Peranan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota masih sangat strategis didalam menjaga stabilitas harga. Sejauh ini, kota-kota yang terpan-tau secara *up to date* terkait perkembangan harga, baik oleh BPS maupun Bank Indonesia di Jawa Timur sebatas pada kota tertentu, seperti: Jember, Banyuwangi, Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Pada periode mendatang, wilayahwilayah lain juga perlu mengumpulkan statistik harga, khususnya beberapa komoditas strategis yang mendominasi struktur konsumsi masyarakat setempat.

Pengaruh Kemiskinan Wilayah terhadap Konsumsi Rumah Tangga

Masyarakat golongan miskin sangat identik dengan keterbatasan berbagai macam akses, salah satunya adalah *resources*. Kemiskinan juga identik dengan rendahnya produktivitas hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya turut memengaruhi rendahnya pendapatan yang diperoleh. Rendahnya pendapatan tersebut linear dengan jumlah konsumsi yang sedikit. Akibatnya, *demand* terhadap barang dan jasa juga akan terko-reksi oleh besarnya pendapatan dan pola konsumsi penduduk miskin. Semakin banyak jumlah penduduk miskin, maka semakin besar dampak negatifnya bagi *agregate demand*.

Hasil dari pemodelan juga menunjukkan bahwa kenaikan persentase penduduk miskin sebesar satu persen akan mengoreksi pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 1,19 persen. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh kecenderungan masyarakat miskin yang menghabiskan pendapatannya untuk konsumsi dan mengabaikan tabungan ([Moav and & Neeman, 2012](#)). Ketika pandemi Covid-19 melanda, berbagai sumber penghasilan akan

berkurang. Mengasumsikan bahwa tidak terdapat sumber pendapatan lain, baik dalam bentuk penggunaan tabungan/dana darurat maupun transfer (seperti bansos), maka dipastikan bahwa konsumsi rumah tangga akan menurun drastis.

Profil demografi suatu wilayah, khususnya indikator kemiskinan menjadi krusial, karena memiliki dampak yang beragam bagi perekonomian. Salah satu implikasinya adalah resiliensi masyarakat dalam menghadapi berbagai jenis krisis, termasuk krisis akibat pandemi Covid-19. Masyarakat miskin merupakan golongan yang pola konsumsinya sangat rentan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diperoleh (Moav and Neeman, 2012; Ur Rahman dkk., 2021). Sementara itu, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan berkurangnya berbagai sumber pendapatan masyarakat miskin. Sedangkan masyarakat miskin kesulitan untuk beradaptasi dengan mencari maupun menciptakan sumber pendapatan lain. Akibatnya, jumlah pendapatan menurun dan tingkat konsumsi juga ikut menurun.

Upaya pengentasan kemiskinan bukanlah suatu hal mudah yang dapat ditangani dalam waktu singkat. Kebijakan *social protection* oleh pemerintah melalui mekanisme *supportive income* merupakan langkah yang tepat. Meskipun demikian, pemerintah juga perlu meningkatkan resiliensi masyarakat miskin dengan memutus rantai kemiskinan dimasa mendatang. Merujuk kepada berbagai rekomendasi temuan penelitian sebelumnya, seperti King & Palmer (2006), Prawoto (2009), Harman, dkk (2016), dan Walker dkk (2019), setidaknya terdapat 3 agenda kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah, mulai dari kebijakan jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang.

Dalam jangka pendek, proteksi bagi warga miskin menjadi sebuah keharusan. Kebijakan tersebut dapat berbentuk bansos, baik berwujud uang tunai, bantuan pangan, subsidi listrik, subsidi pulsa bagi pelajar, maupun subsidi lainnya. Adapun dalam jangka menengah, pemerintah perlu menyiapkan program pendampingan kompetensi bagi masyarakat, seperti penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja maupun penyuluhan/pendampingan. Selain itu, pelaksanaan proyek berbasis padat karya dengan melibatkan rumah tangga miskin sebagai tenaga kerja juga perlu dilakukan. Adapun dalam jangka panjang, pemerintah perlu memutus rantai kemiskinan pada generasi selanjutnya, agar keturunan/anak dari rumah tangga miskin tidak terjerumus dalam persoalan kemiskinan yang sama. Pemberian akses pendidikan yang luas dan memadai menjadi salah satu kebijakan utama yang harus dilakukan.

Pengaruh Digitalisasi terhadap Konsumsi Rumah Tangga

Ketersediaan internet serta *platform digital market* sangat memudahkan kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen. Keberadaannya dapat menciptakan efisiensi dari berbagai aspek, baik waktu, operasional cabang, biaya *sales* dan lainnya. Meskipun demikian, tidak sepenuhnya hal tersebut berdampak positif dan signifikan bagi perekonomian di wilayah tertentu.

Studi kasus di Jawa Timur memperlihatkan temuan yang unik, dimana penambahan jumlah pengguna internet untuk belanja *on-line* ternyata berdampak negatif bagi konsumsi rumah tangga. Dari *output* tersebut memberikan gambaran bahwa keberadaan internet justru bertolak belakang dengan teori dan tujuan dari digitalisasi ekonomi tersebut. Dari *output* pengolahan dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan pengguna internet sebesar satu persen justru berdampak terhadap penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 0,61 persen. Temuan tersebut bertentangan dengan kebanyakan hasil studi-studi serupa, seperti penelitian Sedik dkk. (2019) dan Raeskyesa & Lukas (2019).

Meskipun demikian, fenomena ini dapat dijelaskan oleh jumlah persentase pengguna internet yang rendah, khususnya untuk keperluan jual-beli *online*. Sejauh ini, fakta menun-

jukkan bahwa digitalisasi yang digambarkan melalui persentase pengguna internet memang terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, penggunaan internet yang diperuntukkan sebagai sarana transaksi jual beli *online* jauh lebih sedikit dibandingkan total pengguna internet secara umum. Artinya, bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang memanfaatkan internet untuk keperluan belanja *online*.

Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap konsumsi sebagian besar rumah tangga, salah satunya adalah cara perolehan barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang mengubah cara berbelanja di masyarakat. Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk, mekanisme *take-away* saat membeli makanan, hingga layanan *delivery* menjadi hal yang umum saat ini. Meskipun demikian, keberadaan *digital market* yang mestinya menjadi opsi berbelanja bagi masyarakat tidak sepenuhnya direspon positif. Masih banyak masyarakat yang bertahan dengan cara belanja konvensional, yaitu dengan mendatangi pasar/supermarket secara langsung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi *digital market* hanya dilakukan oleh sebagian orang yang pada periode sebelum pandemi Covid-19 sudah terbiasa berbelanja *online*. Penjelasan tersebut juga didukung oleh data jumlah pengguna internet (untuk belanja *online*) yang mengalami peningkatan tipis pada periode 2019 ke 2020. Oleh karena itu, turunnya *aggregate demand* yang tidak diimbangi oleh *behaviour* masyarakat untuk berbelanja *online* menjadi alasan utama dalam menjelaskan terkait fenomena digitalisasi ekonomi yang berdampak negatif bagi konsumsi rumah tangga.

Meskipun demikian, dengan melihat tren dari data lain, seperti yang dipublikasikan oleh [iPrice \(2021\)](#) terkait peningkatan jumlah pengunjung toko *online*, mengindikasikan bahwa digitalisasi ekonomi masih memiliki prospek yang baik dimasa mendatang. Jika ditelaah lebih lanjut, keberadaan digital ekonomi tetap memiliki andil dalam mem-backup penurunan *agregat demand*, meskipun tidak terlalu signifikan. *Bakcup* tersebut cukup efektif bagi masyarakat yang sudah melek digital, namun tidak berdampak sama sekali bagi mereka bukan pengguna *platform market digital*.

Tindak lanjut mengenai hal tersebut, pemerintah perlu melakukan penetrasi terkait digitalisasi ekonomi dengan lebih masif dan kreatif. Bank Indonesia melalui programnya *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* menjadi salah satu upaya penetrasi digitalisasi keuangan kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Selain itu, Kominfo dengan programnya *UMKM Go Digital* juga perlu berekspansi agar penetrasi digitalisasi di kalangan UMKM bisa berjalan lebih cepat. Selain itu, digitalisasi layanan pemerintahan, baik pada layanan kesehatan, administrasi kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota juga perlu dilakukan sebagai sarana edukasi terkait digitalisasi kepada masyarakat. Pembiasaan dan pengenalan digitalisasi dalam kehidupan keseharian yang dilakukan secara masif akan mendorong masyarakat untuk lebih familiar dengan piranti teknologi dan aktivitas digital.

Pengaruh Bantuan Sosial terhadap Konsumsi Rumah Tangga

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 47 tahun 2003, bahwa keberadaan APBD diperuntukkan untuk mendukung pencapaian tujuan bernegara, yang salah satunya adalah untuk kemakmuran masyarakat melalui berbagai program dan alokasi belanja pemerintah. Salah satu pos yang memiliki dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (khususnya dari aspek konsumsi) yaitu belanja sosial. Keberadaan belanja sosial menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai pondasi alternatif ketika pendapatan masyarakat goyah. Hasil pemodelan terhadap belanja bansos di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur juga memperlihatkan bahwa kenaikan realisasi bansos sebesar 1 milyar akan berdampak terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga secara agregat sebesar $0,00045$ persen.

Hanya saja, pengaruh dari bansos terhadap *recovery* konsumsi rumah tangga relatif kecil. Kecilnya sumbangsih bansos bagi *aggregate demand* dapat dipahami karena bansos yang digulirkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat meng-cover hilangnya pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Hasil kalkulasi terhadap konsumsi rumah tangga perkapita (PDRB harga konstan) menunjukkan bahwa rata-rata setiap rumah tangga di Jawa Timur telah mengurangi konsumsinya sebesar 275 ribu rupiah setiap bulannya. Sementara itu, bansos yang diberikan oleh pemerintah berkisar antara 200-300 ribu rupiah per bulan dan hanya diperuntukkan bagi rumah tangga *targeted*. Sementara itu, rumah tangga lainnya tidak memperoleh kompensasi dari pemerintah. Adanya perbedaan antara jumlah rumah tangga penerima bansos dan jumlah rumah tangga terkena dampak, menjadi penyebab kecilnya andil bansos dalam menjaga daya beli masyarakat.

Meskipun andil bansos bagi pemulihan konsumsi rumah tangga tergolong kecil, signifikansi dari statistik uji memperlihatkan bahwa bansos tetap memiliki andil yang penting. Oleh karena itu, kedepan pemerintah perlu memberikan variasi bansos agar memiliki dampak dalam jangka panjang. Keberadaan bansos tunai dan bantuan pangan sangat membantu masyarakat. Meskipun demikian, dampak yang dirasakan bersifat temporer, dimana masyarakat penerima bansos akan menerima manfaat hanya pada saat tertentu hingga beberapa waktu kedepan. Selebihnya, masyarakat penerima bansos akan kembali pada kondisi seperti semula. Agar bansos tersebut memberikan *multiplier effect*, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka variasi jenis bansos menjadi keharusan. Hal itu dimaksudkan untuk memitigasi berbagai kemungkinan krisis dimasa mendatang, sehingga masyarakat lebih tanggap dan tangguh dalam beradaptasi dengan berbagai jenis krisis lainnya.

Simpulan

Dari sudut pandang konsumsi, besarnya andil konsumsi rumah tangga terhadap PDRB di Jawa Timur menjadikannya sebagai penopang ekonomi secara umum. Oleh karena itu, pemulihan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi di berbagai sektor usaha. Dalam penelitian ini, kajian terhadap *recovery* konsumsi rumah tangga dilakukan dengan menghubungkan beberapa variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan PDRB konsumsi rumah tangga. Hasilnya menunjukkan bahwa separuh dari pola konsumsi rumah tangga di kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dijelaskan oleh empat variabel makro, yang terdiri atas inflasi, profil kemiskinan daerah, digitalisasi ekonomi, dan bantuan sosial.

Inflasi yang mencerminkan pergerakan harga-harga kebutuhan rumah tangga memiliki pengaruh positif terhadap pergerakan konsumsi rumah tangga. Hal itu disebabkan oleh inelastisitas harga pada komoditas kelompok pangan serta terkendalinya capaian inflasi tahunan yang masih dibawah threshold. Sementara itu, profil kemiskinan wilayah memiliki dampak negatif bagi percepatan pemulihan konsumsi rumah tangga. Wilayah dengan persentase jumlah penduduk miskin yang tinggi cenderung mengalami kesulitan untuk pulih dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki proporsi penduduk miskin lebih sedikit.

Sementara itu, digitalisasi ekonomi belum sepenuhnya memiliki dampak yang berarti dalam percepatan pemulihan konsumsi rumah tangga. Rendahnya penambahan persentase pengguna internet untuk belanja online dibandingkan anjloknya *agregate demand* menjadi penyebab utama terjadinya fenomena tersebut. Akan tetapi, digitalisasi ekonomi tetap memiliki prospek yang positif dimasa mendatang. Sementara itu, keberadaan bantuan sosial terbukti memiliki andil yang berarti dalam pemulihan konsumsi rumah tangga, meskipun dengan andil yang relatif kecil. Kecilnya dampak tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan bantuan

sosial dalam meng-cover seluruh pendapatan rumah tangga yang hilang. Meskipun demikian, keberadaan bansos tetap memiliki peran yang positif dalam menahan tingkat keparahan penurunan konsumsi rumah tangga akibat pandemi Covid-19.

Keterbatasan

Hasil dari penelitian ini sudah cukup baik dalam memberikan penjelasan terkait pemulihan konsumsi rumah tangga di Jawa Timur. Hal itu tercermin melalui besarnya nilai adjusted R square sebesar 0,54 yang memberikan interpretasi bahwa keempat variabel yang digunakan dapat menjelaskan variasi pemodelan konsumsi rumah tangga sebesar 54 persen. Meskipun demikian, masih terdapat 46 persen variasi lainnya yang belum terjelaskan.

Penelitian terhadap konsumsi rumah tangga, khususnya selama pandemi Covid-19 tidak cukup dengan pendekatan variabel makroekonomi. Pendekatan dengan variabel lain seperti aksesibilitas keuangan, sosial-kesehatan dan *household behaviour* menjadi penting untuk dieksplor lebih jauh. Oleh karena itu, penggunaan variabel lain seperti inklusi keuangan, manajemen krisis, dukungan kesehatan, dan pola konsumsi masyarakat dapat turut berpengaruh dalam menjelaskan tingkat recovery konsumsi rumah tangga.

Rekomendasi

Saran kebijakan bagi pemerintah untuk percepatan pemulihan konsumsi rumah tangga di Jawa Timur dapat ditempuh dengan beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Stabilitas harga masih menjadi isu utama dalam perekonomian, khususnya ketika berkaitan dengan konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, mengontrol fluktuasi harga terutama komoditas pangan tetap diperlukan agar berada pada kisaran harga yang wajar dan mampu dibeli oleh masyarakat. Selain itu, perlunya mengantisipasi berbagai potensi lonjakan incidental demand akibat kejadian tertentu, sehingga supply shortage dapat dideteksi dan diantisipasi sejak dini.
2. Perlunya penetrasi dan edukasi go-digital pada UMKM dan masyarakat umum. Hal itu untuk menstimulus percepatan digitalisasi dikalangan pelaku usaha maupun konsumen, sehingga potensi pembatasan sosial/interaksi fisik tidak akan berdampak secara drastis terhadap penurunan aktivitas konsumsi rumah tangga.
3. Kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara masif dan progresif pada setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi. Selain itu, diperlukan kombinasi kebijakan yang tepat dengan target pengentasan kemiskinan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
4. Stimulus fiskal dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 perlu dilanjutkan dengan memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Kebijakan tersebut juga perlu diperkuat dengan bauran kebijakan fiskal antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa melalui otonomi anggaran pada masing-masing tingkatan.

Daftar Pustaka

- Abu-Bakar, H., Williams, L., & Hallett, S. H. (2021). Quantifying the Impact of the COVID-19 Lockdown on Household Water Consumption Patterns in England. *Npj Clean Water*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41545-021-00103-8>
- Afonasova, M. A., Panfilova, E. E., Galichkina, M. A., & Ślusarczyk, B. (2019). Digitalization in Economy and Innovation: The Effect on Social and Economic Processes. *Polish Journal of Management Studies*, 19(2), 22–32. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.19.2.02>

- Albari, A., & Safitri, I. (2018). The Influence of Product Price on Consumers' Purchasing Decisions. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(2), 328–337.
- Alvaro, J. A. H., & Ivars, A. E. (2014). The Demand Absorption Coefficient of a Production Line. *Procedia CIRP*, 19, 135–141. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.05.009>
- Andreyeva, T., Long, M. W., & Brownell, K. D. (2010). The Impact of Food Prices on Consumption: A Systematic Review of Research on the Price Elasticity of Demand for Food. *American Journal of Public Health*, 100(2), 216–222. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.151415>
- Arenkov, I., Tsenzharik, M., & Vetrova, M. (2019). Digital Technologies in Supply Chain Management. *Proceedings of the International Conference on Digital Technologies in Logistics and Infrastructure (ICDTLI 2019)*. Proceedings of the International Conference on Digital Technologies in Logistics and Infrastructure (ICDTLI 2019), St. Petersburg, Russia. <https://doi.org/10.2991/icdtli-19.2019.78>
- Astuti, P. B., & Mahardhika, A. S. (2020). COVID-19: How Does It Impact to Indonesian Economy. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(2), 85–92.
- Aydin, C., Esen, Ö., & Bayrak, M. (2016). Inflation and Economic Growth: A Dynamic Panel Threshold Analysis for Turkish Republics in Transition Process. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 229, 196–205. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.129>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2020). *Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. Badan Kebijakan Fiskal. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>
- Bader, C., Bieri, S., Wiesmann, U., & Heinemann, A. (2016). Differences Between Monetary and Multidimensional Poverty in the Lao PDR: Implications for Targeting of Poverty Reduction Policies and Interventions: Differences Between Monetary and Multidimensional Poverty in the Lao PDR. *Poverty & Public Policy*, 8(2), 171–197. <https://doi.org/10.1002/pop4.140>
- Bai, J., Choi, S. H., & Liao, Y. (2020). Standard Errors for Panel Data Models with Unknown Clusters. *Journal of Econometrics*, S0304407620303341. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.08.006>
- Balleer, A., Link, S., Menkhoff, M., & Zorn, P. (2020, July 27). Demand Versus Supply: Price Adjustment during the Covid-19 Pandemic. *VoxEU.Org*. <https://voxeu.org/article/demand-versus-supply-price-adjustment-during-covid-19-pandemic>
- Ben Hmida, J., Lee, J., Wang, X., & Boukadi, F. (2014). Production Scheduling for Continuous Manufacturing Systems with Quality Constraints. *Production & Manufacturing Research*, 2(1), 95–111. <https://doi.org/10.1080/21693277.2014.892846>
- Bjorkdahl, J. (2020). Strategies for Digitalization in Manufacturing Firms. *California Management Review*, 62(4), 17–36. <https://doi.org/10.1177/0008125620920349>
- Bozkurt, C. (2014). Money, Inflation and Growth Relationship: The Turkish Case. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 4(2), 309–322.
- BPS. (2020). *Diagram Timbang Indeks Harga Konsumen Hasil SBH 2018, Buku 2* (06230.2002). Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021a). *[Seri 2010] Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (Persen), 2015-2020*. <https://bps.go.id/indikator/52/289/1/-seri-2010-distribusi-pdrb-terhadap-jumlah-pdrb-34-provinsi-atas>

dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi.html

- BPS. (2021b). [Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2018-2020. <https://bps.go.id/indicator/52/291/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi.html>
- BPS Jawa Timur. (2017). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Jawa Timur Desember 2016* (01/01/35/Th. XV). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2018). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Jawa Timur Desember 2017* (1/1/35/Th, XVI). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2019). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Jawa Timur Desember 2018* (01/01/35/Th. XVII). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2020a). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Jawa Timur Desember 2019* (01/01/35/Th. XVIII). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2020b). *Statistik Pengeluaran untuk Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur 2019* (35520.2001). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2021a). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Jawa Timur Desember 2020* (01/01/35/Th. XIX). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2021b). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur menurut Pengeluaran 2016-2020* (Publikasi Statistik 35000.2108). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2021c). *Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2021* (31/05/35/Th. XIX; pp. 1–12). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Braumann, B. (2004). High Inflation and Real Wages. *IMF Staff Papers*, 51(1), 123–147.
- Breunig, R., & Majeed, O. (2020). Inequality, Poverty and Economic Growth. *International Economics*, 161(1), 83–99. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2019.11.005>
- Cham, T. H., Ng, C. K. Y., Lim, Y. M., & Cheng, B. L. (2018). Factors Influencing Clothing Interest and Purchase Intention: A Study of Generation Y Consumers in Malaysia. *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 28(2), 174–189. <https://doi.org/10.1080/09593969.2017.1397045>
- Chan, C., Trihermanto, F., & Sebastian, E. (2020, May 22). *How COVID-19 is Accelerating Indonesia's Digital Transformation*. Digital Economy. <https://digital.australiaindonesia-centre.org/news/insights/commentary/how-covid-19-is-accelerating-indonesias-digital-transformation/>
- Chen, G. J. (2012). A Simple Way to Deal with Multicollinearity. *Journal of Applied Statistics*, 39(9), 1893–1909. <https://doi.org/10.1080/02664763.2012.690857>
- Chou, Y.-M., Polansky, A. M., & Mason, R. L. (1998). Transforming Non-Normal Data to Normality in Statistical Process Control. *Journal of Quality Technology*, 30(2), 133–141.
- Cochoy, F., Licoppe, C., McIntyre, M. P., & Sorum, N. (2020). Digitalizing consumer society: Equipment and devices of digital consumption. *Journal of Cultural Economy*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/17530350.2019.1702576>
- Coibion, O., Gorodnichenko, D. G. Y., & van Rooij, M. (2019). How Does Consumption Respond to News about Inflation? Field Evidence from A Randomized Control Trial. *DNB Working Paper*, 651, 1–60.

- Crespi, F., & Pianta, M. (2008). Demand and Innovation in Productivity Growth. *International Review of Applied Economics*, 22(6), 655–672. <https://doi.org/10.1080/02692170802407429>
- Dallongeville, J., Dauchet, L., de Mouzon, O., Réquillart, V., & Soler, L.-G. (2011). Increasing Fruit and Vegetable Consumption: A Cost-Effectiveness Analysis of Public Policies. *European Journal of Public Health*, 21(1), 69–73. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckq013>
- de Bruijn, E.-J., & Antonides, G. (2021). Poverty and Economic Decision Making: A Review of Scarcity Theory. *Theory and Decision*. <https://doi.org/10.1007/s11238-021-09802-7>
- del Rio-Chanona, R. M., Mealy, P., Pichler, A., Lafond, F., & Farmer, J. D. (2020). Supply and demand shocks in the COVID-19 pandemic: An Industry and Occupation Perspective. *Oxford Review of Economic Policy*, 36, 94–137. <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa033>
- Devi, L. Y., & Purnomosidi, R. Y. K. H. (2019). Estimation of Demand Elasticity for Food Commodities in Java Island. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 12(1), 54–67. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.18430>
- Diacon, P.-E., & Maha, L.-G. (2015). The Relationship between Income, Consumption and GDP: A Time Series, Cross-Country Analysis. *Procedia Economics and Finance*, 23, 1535–1543. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00374-3](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00374-3)
- Duzan, H., & Shariff, N. S. B. M. (2016). Solution to the Multicollinearity Problem by Adding some Constant to the Diagonal. *Journal of Modern Applied Statistical Methods*, 15(1), 752–773. <https://doi.org/10.22237/jmasm/1462077360>
- Faith, D. O., & Agwu, E. (2014). A Review of The Effect of Pricing Strategies on The Purchase of Consumer Goods. *International Journal of Research in Management, Science & Technology* (, 2(2), 88–102.
- Fellner, W. J., & Goehmann, B. (2020). Human Needs, Consumerism and Welfare. *Cambridge Journal of Economics*, 44(2), 303–318. <https://doi.org/10.1093/cje/bez046>
- Femenia, F. (2019). A Meta-Analysis of the Price and Income Elasticities of Food Demand. *Working Paper SMART – LERECO*, 1–78.
- Gerard, F., Imbert, C., & Orkin, K. (2020). Social Protection Response to the COVID-19 Crisis: Options for Developing Countries. *Oxford Review of Economic Policy*, 36(Supplement_1), S281–S296. <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa026>
- Gobel, L. V. (2015). Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 2(2), 94–103.
- Greene, W. H. (2012). *Econometrics Analysis* (7th ed.). Prentice Hall.
- Haile, F., & Nino-Zarazua, M. (2018). Does Social Spending Improve Welfare in Low-income and Middle-income Countries?: Does Social Spending Improve Welfare? *Journal of International Development*, 30(3), 367–398. <https://doi.org/10.1002/jid.3326>
- Hallegatte, S., Vogt-Schilb, A., Rozenberg, J., Bangalore, M., & Beaudet, C. (2020). From Poverty to Disaster and Back: A Review of the Literature. *Economics of Disasters and Climate Change*, 4(1), 223–247. <https://doi.org/10.1007/s41885-020-00060-5>
- Harman, L., Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Sturge, G., & Barca, V. (2016). Cash Transfers: What Does the Evidence Say? *Overseas Development Institute*, 108.

- Headey, D. D., & Hodge, A. (2009). The Effect of Population Growth on Economic Growth: A Meta-Regression Analysis of the Macroeconomic Literature. *Population and Development Review*, 35(2), 221–248. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2009.00274.x>
- Hensvik, L., Le Barbanchon, T., & Rathelot, R. (2021). Job Search during the COVID-19 Crisis. *Journal of Public Economics*, 194, 104349. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104349>
- Hill, R., Griffiths, W. E., & Lim, G. C. (2011). *Principles of Econometrics* (4th ed.). John Wiley & Son, Inc.
- IMF. (2018). Measuring the Digital Economy. *Policy Papers*, 2018(016). <https://doi.org/10.5089/9781498307369.007.A001>
- iPrice. (2021, July). *Daftar 50 Website & Aplikasi E-Commerce di Indonesia 2019*. <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>
- Irons, J. (2009, September). *Economic Scarring: The Long-Term Impacts of the Recession*. Economic Policy Institute. <https://www.epi.org/publication/bp243/>
- Jaramillo, L., & Chailloux, A. (2015). It's Not All Fiscal: Effects of Income, Fiscal Policy, and Wealth on Private Consumption. *IMF Working Paper WP/15/112*, 1–30.
- Jaravel, X., & O'Connell, M. (2020). Real-Time Price Indices: Inflation Spike and Falling Product Variety during the Great Lockdown. *Journal of Public Economics*, 191, 104270. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104270>
- Jensen, E. (2009). *Teaching With Poverty in Mind: What Being Poor Does to Kids' Brains and What Schools Can Do About It* (1st ed.). ASCD.
- Kemenkeu. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020*. Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/d48fce0e-6a39-4d33-8573-7949ffa1ca78/43TAHUN2020PP.pdf>
- Khan, S., Khan, S., & Aftab, M. (2015). Digitalization and Its Impact on Economy. *International Journal of Digital Library Services*, 5(2), 138–149.
- Khaniwale, M. (2015). Consumer Buying Behavior. *International Journal of Innovation and Scientific Research*, 14(2), 278–286.
- Kim, R. Y. (2020). The Impact of COVID-19 on Consumers: Preparing for Digital Sales. *IEEE Engineering Management Review*, 48(3), 212–218. <https://doi.org/10.1109/EMR.2020.2990115>
- King, K., & Palmer, R. (2006). Skills Development and Poverty Reduction: The State of the Art. *Working Paper Series - N°9*, 1–84.
- Krugman, P., & Wells, R. (2006). *Macroeconomics* (2nd ed.). Worth Publishers.
- Kubicova, L., Kadekova, Z., Turcekova, N., & Bielik, P. (2019). Consumption of Food in Relation to Income and Saturation Limit of Slovak Households. *Agricultural Economics (Zemědělská Ekonomika)*, 65(No. 12), 560–568. <https://doi.org/10.17221/94/2019-AGRICECON>
- Kusumatrisna, A. L., Sugema, I., & Pasaribu, S. H. (2019). Efek Threshold Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 43–52. <https://doi.org/10.14203/JEP.27.1.2019.43-52>
- Lim, G., Nguyen, V., Robinson, T., Tsiapias, S., & Wang, J. (2021). The Australian Economy in 2020–21: The COVID-19 Pandemic and Prospects for Economic Recovery. *Australian Economic Review*, 54(1), 5–18. <https://doi.org/10.1111/1467-8462.12405>

- Maestas, N., Mullen, K. J., & Powell, D. (2016). The Effect of Population Aging on Economic Growth, the Labor Force and Productivity. *RAND Working Papers*, 1–53.
- Mankiw, N. G. (2012). *Macroeconomics* (8th ed.). Worth Publishers.
- Martin, A., Markhvida, M., Hallegatte, S., & Walsh, B. (2020). Socio-Economic Impacts of COVID-19 on Household Consumption and Poverty. *Economics of Disasters and Climate Change*, 4(3), 453–479. <https://doi.org/10.1007/s41885-020-00070-3>
- Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL POLITICO*, 9(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30702>
- McKibbin, W., & Fernando, R. (2021). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. *Asian Economic Papers*, 20(2), 1–30. https://doi.org/10.1162/asep_a_00796
- Mehta, S., Saxena, T., & Purohit, N. (2020). The New Consumer Behaviour Paradigm amid COVID-19: Permanent or Transient? *Journal of Health Management*, 22(2), 291–301. <https://doi.org/10.1177/0972063420940834>
- Mello Jr., L. R. de, & Carneiro, F. G. (2000). Consumption Behaviour and Persistently High Inflation: Evidence from Latin America. *Revista Brasileira de Economia*, 54(2). <https://doi.org/10.1590/S0034-71402000000200005>
- Moav and, O., & Neeman, Z. (2012). Saving Rates and Poverty: The Role of Conspicuous Consumption and Human Capital. *The Economic Journal*, 122(563), 933–956. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2012.02516.x>
- Mottaleb, K. A., & Mishra, A. K. (2016). Rice Consumption and Grain-Type Preference by Household: A Bangladesh Case. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 48(3), 298–319. <https://doi.org/10.1017/aae.2016.18>
- Ni Mhurchu, C., Eyles, H., Schilling, C., Yang, Q., Kaye-Blake, W., Genç, M., & Blakely, T. (2013). Food Prices and Consumer Demand: Differences across Income Levels and Ethnic Groups. *PLoS ONE*, 8(10). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075934>
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The Socio-Economic Implications of the Coronavirus Pandemic (COVID-19): A Review. *International Journal of Surgery*, 78, 185–193. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.04.018>
- Oner, C. (2020, February). *Inflation: Prices on the Rise*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/inflat.htm>
- Peterson, E. W. F. (2017). The Role of Population in Economic Growth. *SAGE Open*, 7(4), 215824401773609. <https://doi.org/10.1177/2158244017736094>
- Pistaferri, L. (2015). Household Consumption: Research Questions, Measurement Issues, and Data Collection Strategies. *Journal of Economic and Social Measurement*, 40(1–4), 123–149. <https://doi.org/10.3233/JEM-150401>
- Poser, G., & Shipchandler, Z. E. (1979). Impact of Inflation on Consumer Life Style: Some Empirical Results on the Money Illusion and Consumer Purchasing Behaviour. *European Journal of Marketing*, 13(3), 103–112. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000004933>
- Pradesha, A., Amaliah, S., Noegroho, A., & Thurlow, J. (2020). The Cost of COVID-19 on the Indonesian Economy: A Social Accounting Matrix (SAM) Multiplier Approach. *Interna-*

- tional Food Policy Research Institute*, 1–11.
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68.
- Raeskyesa, D. G. S., & Lukas, E. N. (2019). Does Digitalization Increase Economic Growth? Evidence from ASEAN8 Countries. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(2), 267–278. <https://doi.org/10.52813/jei.v8i2.33>
- Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11(2), 215–227. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1756>
- Roelen, K. (2017). Monetary and Multidimensional Child Poverty: A Contradiction in Terms? : Monetary and Multidimensional Child Poverty. *Development and Change*, 48(3), 502–533. <https://doi.org/10.1111/dech.12306>
- Rosidin, Mardhatillah, M., Andriani, F., Fitriani, A., & Rohmanan, M. (2021). *Individual and Household Economic Recovery After the Covid-19 Through Temporary Waqf Program*: 2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020), Malang, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210413.064>
- Rozaki, Z. (2020). COVID-19, Agriculture, and Food Security in Indonesia. *Reviews in Agricultural Science*, 8(0), 243–260. https://doi.org/10.7831/ras.8.0_243
- Sedik, T. S., Chen, S., Feyzioglu, T., Ghazanchyan, M., Gupta, S., Jahan, S., Jauregui, J. M., Kinda, T., Long, V., Loukoianova, E., Mourmouras, A., Nozaki, M., Paroutzoglou, S., Sullivan, C., Yoo, J., & Zhang, L. (2019). The Digital Revolution in Asia and Its Macroeconomic Effects. *ADB Working Paper Series*, 1–29.
- Shaheen, R. (2019). Impact of Fiscal Policy on Consumption and Labor Supply under a Time-Varying Structural VAR Model. *Economies*, 7(2), 57. <https://doi.org/10.3390/economies7020057>
- Sheth, J. (2020). Impact of Covid-19 on Consumer Behavior: Will the Old Habits Return or Die? *Journal of Business Research*, 117, 280–283. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.059>
- Shyla, J. (2020). Emperor International Journal of Finance and Management Research. *Emperor International Journal of Finance and Management Research*, 5(7), 1–12.
- Skeffington, J. S., & Rea, J. (2017). *How Poverty Affects People's Decision-Making Processes* (pp. 1–75). Joseph Rowntree Foundation. <https://www.lse.ac.uk/business-and-consultancy/consulting/assets/documents/how-poverty-affects-peoples-decision-making-processes.pdf>
- Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia Under the New Normal: Challenges and the Way Ahead. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 269–299. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>
- Sumarto, S., Suryahadi, A., & Widyanti, W. (2004). Assessing the Impact of Indonesian Social Safety Net Programs on Household Welfare and Poverty Dynamics. *The SMERU Research Institute*, 1–30.
- Suryahadi, A., Izzati, R. A., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. *SMERU Working Paper*, 1–13.
- Susanto, J. (2014). Impact of Economic Growth, Inflation and Minimum Wage on Poverty in Java. *Dian Nuswantoro*, 22(1), 32–41.

- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>
- Toni, R., & Hyyrylainen, T. (2018). Digitalisation of Consumption and Digital Humanities: Development Trajectories and Challenges for the Future. *Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 3rd Conference*, 1–8.
- UNDP, & LPEM FEB UI. (2020). *Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs in Indonesia* (pp. 1–73). United Nations Development Programme.
- Ur Rahman, I., Jian, D., Junrong, L., & Shafi, M. (2021). Socio-Economic Status, Resilience, and Vulnerability of Households under COVID-19: Case of Village-Level Data in Sichuan Province. *PLOS ONE*, 16(4), e0249270. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249270>
- Valaskova, K., Kramarova, K., & Bartosova, V. (2015). Multi Criteria Models Used in Slovak Consumer Market for Business Decision Making. *Procedia Economics and Finance*, 26, 174–182. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00913-2](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00913-2)
- Vinayagathan, T. (2013). *Inflation and Economic Growth: A Dynamic Panel Threshold Analysis for Asian Economies* [Discussion Paper].
- Walker, J., Pearce, C., Boe, K., & Lawson, M. (2019). The Power of Education to Fight Inequality. *Oxfam Briefing Paper*, 1–75.
- Werning, I. (2012). *Managing a Liquidity Trap: Monetary and Fiscal Policy* [Unpublished Paper].
- Wertheim-Heck, S., Raneri, J. E., & Oosterveer, P. (2019). Food Safety and Nutrition for Low-Income Urbanites: Exploring A Social Justice Dilemma in Consumption Policy. *Environment and Urbanization*, 31(2), 397–420. <https://doi.org/10.1177/0956247819858019>
- Wu, B. (2011). The Macro-Control System on the Consumption Market. In *Consumption and Management* (pp. 99–110). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-1-907568-07-7.50005-5>
- Yoon, J.-W., Kim, J., & Lee, J. (2018). Impact of Demographic Changes on Inflation and the Macroeconomy†. *KDI Journal of Economic Policy*, 40(1), 1–30. <https://doi.org/10.23895/KDIJEP.2018.40.1.1>
- Yu, K. D. S., Aviso, K. B., Santos, J. R., & Tan, R. R. (2020). The Economic Impact of Lockdowns: A Persistent Inoperability Input-Output Approach. *Economies*, 8(4), 1–14. <https://doi.org/10.3390/economies8040109>
- Yunanto, M., & Medyawati, H. (2015). Monetary and Fiscal Policy Analysis: Which is More Effective? *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(3). <https://doi.org/10.22146/jieb.6470>